



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI (BPKH)

UNIT KERJA : BADAN PELAKSANA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **M. ARIEF MUFRAINI**
2. Jabatan : **ANGGOTA**
3. NHK : **894099**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 7.499.382.620**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 500 m2/500 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, Rp. 716.107.500
2. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.802.500.000
3. Tanah Seluas 1.927 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, Rp. 1.099.941.120
4. Tanah Seluas 699 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, Rp. 572.886.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 600 m2/600 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, Rp. 2.247.048.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.060.900.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 445.250.000**

1. MOBIL, NISSAN MINI BUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
2. MOBIL, HONDA JEEP Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 255.000.000
3. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 13.500.000



4. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.
6.750.000
5. MOTOR, QJ MOTOR SRV 250 Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp.
70.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 660.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. 350.000.000

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.782.017.843

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 10.736.650.463

III. HUTANG Rp. 509.352.087

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 10.227.298.376

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.